



**RELEASE**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI**  
**KE KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT**  
**DALAM RANGKA PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN**  
**PENANGANAN BENCANA**  
**26-28 MARET 2024**

---

Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial dan penanganan bencana di Kabupaten Bogor, dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan Pj. Bupati Kabupaten Bogor beserta jajaran dan menyalurkan bantuan sosial kepada penerima manfaat di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI pada tanggal 26-28 Maret 2024 dipimpin oleh H. Marwan Dasopang, M.Si. dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bogor menghasilkan temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

**A. Temuan**

1. Penyaluran bantuan sosial dan penanganan bencana di Kabupaten Bogor dilakukan dengan baik, dalam artian semua pihak yang bertanggungjawab terlibat aktif. Walau demikian, masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan dengan segera.
2. Permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bogor, antara lain: *exclusion and inclusion error* data penerima manfaat; KPM belum memiliki KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan buku tabungan; KPM terkendala dengan data kependudukan sehingga menyebabkan bantuan tidak cair; minimnya fasilitas perbankan/ATM, sehingga menyulitkan KPM untuk mencairkan bansos. Karena itu, Dinsos berkoordinasi dengan pihak bank agar menambah agen penyalur; dan kesulitan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak PT Pos dan HIMBARA untuk percepatan penyaluran bansos setiap tahapnya.
3. Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang rawan bencana longsor, angin puting beliung, dan banjir.
4. Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan mitigasi bencana dan

kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait baik Pemerintah dan swasta.

## **B. Rekomendasi**

1. Pemerintah Kabupaten Bogor harus meningkatkan praktik baik dalam penyaluran bantuan sosial dan penanganan bencana. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial dan penanganan bencana akan semakin efektif dan efisien.
2. Pemerintah Kabupaten Bogor harus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial.
3. Pemerintah Kabupaten Bogor harus meningkatkan koordinasi dengan BNPB dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana, karena Kabupaten Bogor rawan bencana longsor, angin puting beliung, dan banjir.

Bogor, 26 Maret 2024

Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Bogor Provinsi Jawa Barat